

## MENYIKAPI KEARIFAN LOKAL: MENGGALI, MENGHARGAI, DAN MENGKRITISI<sup>1</sup>

Safrudin Amin<sup>2</sup>

Dosen Antropologi Sosial, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun

e-mail: [safrudinamin@gmail.com](mailto:safrudinamin@gmail.com)

### PENGANTAR

Dalam salah satu diskusi saya diberi tema: “Menemukan Kembali Sumber kebaikan dalam adat Hidup Manusia Maluku Utara”. Topik ini mengandung dua kesan sekaligus. Pertama, kita seolah sudah kehilangan kebaikan dalam adat sehingga perlu ditemukan kembali. Kedua, kebaikan-kebaikan dalam adat tersebut, yang secara umum disebut kearifan lokal, dipandang sebagai aspek yang sangat penting sehingga harus ditemukan kembali. Perhatian utama makalah ini adalah pada kedua kesan tersebut.

Mengacu pada topik di atas, khususnya makna implikasinya pada aspek kedua, tulisan ini akan menjalankan dua tugas. Pertama, tulisan ini mencoba menemukan kembali kearifan-kearifan dalam adat masyarakat Maluku Utara dengan mengacu pada studi-studi pemetaan nilai budaya yang sudah pernah ada. Kedua, sebagai tambahan, artikel ini mencoba menyajikan sikap kritis terhadap klaim kebaikan dalam kearifan lokal agar kearifan lokal yang dipromosikan tidak terjebak pada ketidak-arifan lokal dan tidak bertolak belakang dengan “kearifan nasional”. Kedua sikap ini, menemukan dan menyikapi kearifan lokal secara kritis, perlu menjadi agenda kebudayaan kita di Maluku Utara jika harmoni sosial dipandang penting bagi masa depan masyarakat di wilayah ini.

### INTRODUCTION

*In one of the discussions I was given the theme: "Rediscovering the Source of Goodness in Indigenous People's Life of North Maluku". This topic contains two impressions at once. First, we seem to have lost the best in custom that needs to be rediscovered. Secondly, the goodness of the custom, commonly called local wisdom, is seen as a very important aspect that must be rediscovered. The main concern then is this on both impressions.*

*Referring to the above topics, particularly the implications of the second aspect, this paper will perform two tasks. Firstly, this paper attempts to rediscover the wisdom of indigenous people of North Maluku with reference to studies of mapping of cultural values that have already existed. Secondly, in addition, this article attempts to present a critical attitude to the claim of goodness in local wisdom in order that promoted local wisdom is not trapped in local indifference and does not contradict "national wisdom". Both these attitudes, finding and responding to local wisdom critically, need to be our cultural agenda in North Maluku if social harmony is seen as important for the future of society in the region.*

---

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan pengembangan dari materi presentasi yang pernah saya sampaikan pada acara BACARITA KAMPONG Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Maluku Utara, di Hotel Dragon Palace. Ternate, 05 - 06 Agustus 2017.

<sup>2</sup> Dosen Antropologi Sosial Universitas Khairun Ternate.

## MEMETAKAN KEARIFAN LOKAL

Upaya “menemukan” kembali kearifan lokal secara lugas menuntut aktivitas penelitian untuk menemukan dan memetakan potensi kearifan yang terendapkan dalam pengetahuan, pranata, dan praktek sosial masyarakat lokal. Sejauh ini beberapa penelitian telah dilakukan oleh beberapa pihak dan dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat Maluku Utara dapat dikelompokkan kedalam kearifan sosial dan kearifan pengelolaan lingkungan (Amin, Karman, dan Madjid, 2009). Khusus dalam hubungan antar manusia, fokus perhatian artikel ini adalah kearifan lokal bidang sosial-budaya.

Kita telah mengenal atau mendengar nilai-nilai lokal yang baik – kearifan lokal – baik lewat cerita, diskusi, dan bahkan lewat membaca buku dan jurnal. Beberapa riset juga telah mengungkapkan adanya beberapa bentuk kearifan lokal di Maluku Utara baik riset yang bertujuan mendalami suatu komunitas tertentu maupun riset yang bersifat pemetaan lebih dari satu komunitas (Saumur, 2013; Amin, Karman, dan Madjid, 2009; Amin, Abd Rahman, dan Basyir, 2008; Kasim, Richter, dan Amin, 2010). Karena keterbatasan ruang, berikut hanya disajikan beberapa contoh bentuk kearifan lokal di domain sosial pa-

da empat suku (kelompok etnis) dalam hal kerjasama dalam masyarakat.

**Tabel 1: Contoh Kearifan Lokal dalam Hal Kerjasama Empat Etnis di Maluku Utara**

SUKU	PRANATA KERJASAMA	MAKSUD, CARA, DAN KONTEKS
<b>Ternate</b>	<i>Oho Bari</i>	Adalah saling tolong menolong dalam kegiatan bersama pada lingkungan sosial/sekitar rumah tangga.
	<i>Maku oro gia (Saling ambil tangan)</i>	Adalah bentuk tolong-menolong/gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan di kebun dan bisa juga pada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, tergantung pada kesepakatan jenis pekerjaan apa yang akan dikerjakan.
	<i>Liliyan</i>	Adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan pada upacara kematian/orang meninggal, acara perkawinan, acara doa selamatan dan lain-lain, orang Ternate punya kebiasaan saling membantu pada acara-acara tersebut.
	<i>Rorio (Saling Menolong)</i>	Kegiatan ini terjadi pada malam sebelum akad nikah dilaksanakan sekitar pukul 19.00 sd 23.00.
	<i>Morom</i>	Semacam arisan, urunan bergilir dalam hal pengadaan material pembuatan rumah.
	<i>Maku rorio</i>	Di dalam Maku rorio tidak dikenal dengan istilah kewajiban membalas setelah menerima hak, karena saling membantu dalam pekerjaan yang bersifat umum/fasilitas umum, seperti membuat pagar kampung, menggali sumur umum, membangun masjid dan fasilitas umum yang lainnya.
<b>Tidore</b>	<i>Bari/mabari</i>	Bentuk kerja sama yang bersifat suka rela (membantu tanpa mengharapkan akan dibantu kembali). Oleh karena itu orang yang dibantu berkewajiban untuk menyediakan/memberi makan kepada orang-orang yang datang membantu. <b>Mabari</b> pada orang Tidore saat ini banyak terlihat pada aktivitas sekitar rumah tangga, seperti menggali sumur, membuat Rumah (barifola) dan yang lainnya, sedangkan untuk pekerjaan/aktivitas pertanian sudah mulai jarang terlihat.
	<i>Galasi</i>	Adalah bentuk kerja sama pada aktivitas/pekerjaan di bidang pertanian. Pekerjaan yang dilakukan seperti membuka lahan tanam yang baru atau

		membersihkan rumput (tumbuhan liar) dengan diiringi nyanyian-nyanyian yang disebut dengan <i>Romoro</i> . <i>Galasi</i> memiliki kemiripan dengan Bari yakni yang empunya pekerjaan harus menyediakan makanan, sedangkan perbedaannya adalah <i>Galasi</i> berifat timbal balik karena yang pernah dibantu harus membantu kembali bila saatnya diperlukan.			Namun demikian <i>Babari</i> tidak saja dilakukan pada bidang pertanian tetapi juga dilaksanakan pada aktifitas disekitar lingkungan sosial seperti membangun rumah, menggali sumur, dll).
	<b>Liliyan</b>	Adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan pada upacara kematian/orang meninggal, acara perkawinan, acara doa selamatan dan lain-lain, orang Tidore juga memiliki kebiasaan saling membantu pada acara-acara tersebut. Orang-orang yang datang menolong lebih dikarenakan pada keihlasan, mereka terpanggil untuk datang membantu secara spontanitas, tidak saja membantu pekerjaannya tetapi juga datang dengan membawa barang/bahan atau uang yang bisa membantu meringankan beban orang yang melaksanakan kegiatan tersebut.		<b>Tugutil</b>	<b>Ma'uriono</b> Merupakan bentuk kerja sama yang berkaitan dengan sistim mata pencaharian hidup orang Tugutil, seperti berburu, meramu pohon sagu dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Semua aktivitas tolong menolong orang Tugutil tidak memiliki karakter yang jauh berbeda dengan sistim tolong menolong yang ada pada masyarakat yang sudah kompleks, yang memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan kebutuhan. Pada orang Tugutil hanya mengenal saling membantu yang berdasarkan karena rasa kebersamaan.
	<b>Maba</b>	<b>Falgali</b> (pada orang Maba) atau <b>Felgali</b> (pada orang Bicoli) Adalah sebuah konsep umum tentang nilai gotong royong dan rasa kebersamaan yang dimiliki oleh orang/suku Maba, <i>falgali</i> ini adalah bentuk kerja sama dalam bidang yang berkaitan dengan sistem mata pencaharian hidup dan lingkungan sosial/masyarakat. <b>Falgali</b> atau <b>Felgali</b> adalah sebuah konsep gotong royong yang berlaku umum kepada seluruh orang Maba, nilai <i>Falgali</i> masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. <i>Falgali</i> adalah bentuk saling membantu/gotong royong diterapkan pada kehidupan sehari-hari seperti pada acara kematian, perkawinan dan acara selamatan yang lainnya.			<b>Maikoyomo</b> Adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pekerjaan sekitar rumah tangga/tempat tinggal. Kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan sekitar rumah tangga/tempat tinggal. <i>Maikoyomo</i> dapat disamakan dengan <i>Bari</i> pada suku/etnik di Maluku Utara pada umumnya, perbedaannya adalah pada orang Tugutil empunya pekerjaan tidak harus meminta tolong dari rumah ke rumah, tetapi mereka masing-masing telah mengetahuinya, hal ini dikarenakan mereka dalam kelompok dan jumlah yang sangat sedikit.
	<b>Babari</b>	<b>Babari</b> adalah bentuk kerja sama/gotong-royong yang bersifat timbal balik, seseorang yang pernah dibantu wajib dia harus membantu kembali. Pada kegiatan <i>Babari</i> orang yang dibantu harus berkewajiban memberi makan dan minum selama pekerjaan berlangsung.			<b>Makokuduhunu</b> (Saling mendukung) adalah saling membantu/tolong menolong pada upacara kematian, per-kawinan dan upacara lainnya yang bersifat religius. Saling membantu yang dilakukan oleh warga pada upacara kematian, acara perkawinan dan kegiatan lainnya yang bersifat religius (seperti upacara <i>Gomanga Yohakai/Sesajin untuk roh orang yang telah meninggal</i> ). Pada kegiatan tersebut, seluruh warga tidak melakukan aktivitas lain, selain dari ikut serta dalam proses upacara. Dan mereka saling membantu mulai dari mencurahkan tenaga sampai pada bantuan materi dalam bentuk bahan makanan.

Sumber: Safruddin Abd Rahman, Safrudin Amin, dan Adlan Absyir, 2008, *Identifikasi Nilai-nilai Tradisional Suku Bangsa di Maluku Utara*. (Laporan Penelitian, belum terpublikasi).

Data dari empat suku bangsa di Maluku Utara di atas menunjukkan betapa kaya kearifan lokal masyarakat Maluku Utara. Kearifan lokal tersebut mengandung nilai dan praktek baik yang pernah dijalankan masyarakat dan sebagian masih dijalankan hingga sekarang. Walaupun demikian, sikap kritis dan analitik terhadap kearifan lokal kita harus tetap dihidupkan agar upaya penggalian kearifan lokal tidak sekedar upaya meromantisasi masa lalu dan glorifikasi etnosentrisme masa kini.

#### **SIKAP KRITIS: SEBERAPA ARIF- KAH KEARIFAN LOKAL ITU?**

Dalam salah satu forum tentang kebudayaan yang saya hadiri sebagai narasumber di tahun 2012, sebagian besar narasumber dan peserta terlibat diskusi serius tentang hilangnya kearifan lokal yang pernah ada di masa lalu dan tampaknya mereka diliputi penyesalan terhadap keadaan kekinian yang seolah lepas dari kearifan masa lalu. Terasa begitu kuat suasana glorifikasi masa lalu atau semacam romantisme tentang “kebaikan” masa lalu di forum itu.

Dalam konteks diskusi kearifan lokal kebudayaan kita sendiri, ada begitu banyak pertanyaan kritis yang bisa muncul berkenaan dengan glorifikasi kearifan lokal masa lalu. Benarkah masa lalu kita di Maluku Utara lebih baik/arif dibandingkan masa kini? Mengapa kearifan lokal masa

lalu itu, jika memang ada, kini banyak telah menghilang dan hanya menjadi objek kerinduan dan romantisme? Apakah kearifan lokal selalu berarti kita merujuk ke masa lalu? bagaimana dengan praktek baik yang lahir pada masyarakat lokal masa kini? Bagaimana dengan praktek baik yang diperkenalkan dari luar dan telah teradopsi dalam kebudayaan lokal? Jika menganggap dan mengagungkan kearifan lokal sebagai endapan kultural yang berasal dari masa lalu yang bersifat lokal dan perlu digali saat ini, bagaimana sikap kita terhadap praktek baik dari luar yang belum diadopsi tapi potensial untuk meningkatkan kualitas kebudayaan lokal? Benarkah kearifan lokal itu cukup arif? Jangan-jangan kearifan lokal justru menjadi sumber letidak-arifan lokal? Dan masih banyak pertanyaan lain seputar gagasan kearifan lokal yang bisa diajukan.

Di bagian ini saya tidak bertujuan untuk menjawab semua pertanyaan kritis di atas karena hampir setiap pertanyaan memiliki tuntutan pendalaman sendiri-sendiri. Mengingat keterbatasan ruang dalam artikel jurnal, maka bagian berikut hanya akan berfokus merespon beberapa pertanyaan saja.

Kearifan lokal seringkali disinonimkan dengan pengetahuan lokal “*local knowledge*” atau kecerdasan lokal

“*local genius*” atau seringkali pula disebut dengan “*indigeneous knowledge*”. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah di dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka (Amin, Madjid, Karman, 2009: 3). Pengertian kearifan lokal secara umum sangat longgar sehingga memungkinkan berbagai multi-penafsiran dan multi-penggunaan dalam realitas sosiobudaya keseharian.

Kecenderungan menengok ke masa lalu ketika membicarakan kearifan lokal, dalam tingkatan tertentu, tidak-lah salah karena dua alasan. Pertama, kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan lokal sesungguhnya diperoleh lewat proses pewarisan secara turun temurun dari generasi sebelumnya. Kedua, sebagai bagian dari kebudayaan, kearifan lokal dapat sangat rentan terhadap perubahan sosiobudaya yang datang dari dalam maupun dari luar sehingga membuat daya ikatnya menjadi berkurang dan bahkan hilang. Dua hal tersebut, sebagai produk warisan masa lalu yang diwariskan dan sebagai elemen yang mengalami perubahan karena itu bisa melemah membuat wacana kearifan lokal seringkali membawa imajinasi kita ke ma-

sa lalu yaitu periode dimana kearifan lokal kita yakini masih kuat dan benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Konsekuensi dari kuatnya dimensi masa lampau dalam wacana dan konstruksi kearifan lokal membuat usaha menggali, memetakan, dan merekonstruksi kearifan lokal seringkali diawali dengan menggali mitos tentang asal-usul dan mitos-mitos lainnya yang menjadi basis bagi pengetahuan lokal masyarakat. Dalam mitos dan pengetahuan lokal masa lampau ditemukan dan diekstrak pengetahuan tentang batas wilayah adat, parktek-praktek adat dan ritual, dan lainnya yang dipraktekan atau diidealkan di masa lampau.

Dalam kasus-kasus ketika penggalian pengetahuan dan kearifan masa lalu menjadi bagian dari konstruksi peta wilayah adat masa kini, seringkali komunitas pendatang yang telah mendiami wilayah yang saat ini diklaim bagian dari tanah adat menjadi terancam karena dalam mitos dan adat masa lalu komunitas pendatang tidak ada (tidak disebutkan) sehingga tidak ada ruang bagi mereka untuk mengakses, mengeksploitasi, dan atau menempati wilayah atau struktur sosial kini yang berbasis mitos dan adat masa lampau. Dalam kasus-kasus kontestasi atau konflik, pengetahuan lokal yang menjadi basis konstruksi identitas dan peta wilayah

adat, yang seringkali dipandang bagian dari kearifan lokal, justru bisa berubah menjadi basis justifikasi kekerasan, pembunuhan, dan pengusiran terhadap pendatang sebagaimana pengusiran orang-orang Madura oleh orang Dayak di Kalimantan (Davidson, 2010). Bahkan Henley dan Davidson menyebut “adat has served rationale for ethnic exclusion and a justification for ethnic violence” (2008: 818).

Mitos atau sejarah lisan yang dijadikan basis bagi kearifan lokal, misalnya dalam hal peta wilayah adat dan hak eksploitasi sumberdaya alam, juga seringkali menjadi ranah yang kontestatif yang memicu konflik. Hal itu terjadi ketika mitos atau sejarah lisan suatu komunitas yang dijadikan basis justifikasi bagi klaim hak adat atas suatu wilayah eksploitasi berhadapan dengan mitos komunitas lain yang juga menjadi basis justifikasi bagi klaim hak terhadap wilayah yang diklaim komunitas pertama tadi. Dedi Supriadi Adhuri (2005) dalam studi lapangannya di pulau Kei Besar menemukan konflik antara masyarakat desa Tutrean dan desa Sather terkait batas wilayah laut kedua desa. Penduduk desa Tutrean mengklaim batas wilayah laut mereka adalah satu tempat di mana menurut masyarakat desa Sather sudah termasuk kedalam wilayah laut mereka.

Klaim yang berbeda ini sering menyulut konflik. Masing-masing mengklaim hak berdasarkan sejarah lisan mereka masing-masing yang mengandung cerita tentang asal-usul mereka dan klaim atas hak terhadap wilayah laut.

Adhuri juga menemukan gejala yang relatif mirip di pulau Kei Kecil konflik atas penguasaan wilayah laut terjadi antara Ohoislam (Islam) dan Ohoisanan (katolik) di desa Sathean. Konflik kedua kampung sudah terjadi beberapa kali. Konflik tahun 1964 dipicu adanya penduduk kampung Islam menangkap ikan menggunakan bagan menuai protes kampung Kristen karena dipandang akan menyedot sumberdaya ikan sehingga warga kampung Kristen tdk mendapatkan ikan. Atas protes itu orang kampung Islam berhenti mengoperasikan bagannya. Tahun 1984 ada lagi penduduk kampung Islam mengoperasikan bagan dan diprotes lagi. Konflik ini pun dapat berakhir dengan kesepakatan: 1) org kampung Islam diharuskan membayar uang sewa penggunaan wilayah laut tempat mereka mengoperasikan bagannya. 2) Orang kampung Islam dilarang mengoperasikan bagannya di wilayah yg menjadi tempat penangkapan ikan org kampung Kristen.

Dedi Adhury, peneliti, menulis “kedua kesepakatan ini mengindikasikan

org kampung Kristen menganggap orang kampung Islam adalah ‘orang luar’ atau dianggap tidak punya hak yang sama dengan penduduk kampung Kristen dalam hubungannya dengan pemilikan dan penguasaan wilayah laut mereka. Setelah ditelusuri lebih mendalam tentang hubungan kedua kampung tersebut, nampaknya penyebab konflik di antara mereka bukan hanya perbedaan teknologi penangkapan atau distribusi sumberdaya melainkan juga terkait dengan asal-usul penduduk kedua kampung”.

“Dalam **sejarah lisan** asal usul penduduk kedua kampung tersebut bahwa penduduk Kristen yg pertama kali datang dan menempati wilayah desa tersebut, sementara itu penduduk kampung Islam adalah keturunan seorang laki-laki Bugis yang menikah dengan seorang wanita dari kampung Kristen yang pada saat itu masih memeluk agama lokal. Jadi menurut penduduk kampung Kristen, penduduk kampung Islam bukanlah penduduk ‘asli’ Sathean. Penduduk Sathean asli menurut mereka adalah keturunan pendiri kampung atau desa itu melalui garis (keturunan) laki-laki. Karena penduduk kampung Islam adalah keturunan seorang laki-laki Bugis yang menikah dengan wanita Sathean, maka mereka lebih merupakan orang Bugis daripada orang Sathean.

Konflik antara kedua dusun ini menunjukkan adanya pemilahan penduduk lokal dalam hubungannya dengan akses terhadap wilayah dan sumberdaya laut berdasarkan identitas ‘kelokalan’ atau keaslian dan kesukuan mereka. Konflik ini juga berbasis pada pandangan budaya yang bias gender dimana keturunan perempuan dianggap tidak berhak atas sumberdaya alam yang ada, sekalipun wanita itu asli masyarakat lokal.

Tidak jarang adat dan indigenitas di atasnamakan oleh kelompok tertentu demi tujuan-tujuan politik mereka sendiri tanpa berdampak pada komunitas yang seharusnya mereka wakili. Di Tarakan Kalimantan Chris Wilson menemukan munculnya sekelompok orang Tidung, etnis yang dipandang asli, yang mengatasnamakan pembelaan terhadap masyarakat lokal, namun ternyata mereka berusaha mencapai kepentingan mereka sendiri (2013). Gejala yang sama juga ditemukan oleh Tania Li di Sulawesi Tengah. Li menemukan bahwa dalam kontestasi politik antar berbagai kelompok di Sulawesi Tengah, adat seringkali dijadikan sebagai senjata etnopolitik oleh kelompok yang bersaing (2007).

Di era desentralisasi dan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah seringkali menjadi ajang pertarungan politik yang

memanfaatkan adat sebagai bagian dari instrument politik. Para kandidat mempraktekan upacara atau adat sebagai bagian dari kampanye politik mereka, berkampanye dengan bahasa lokal (adat), menggunakan pakaian khas adat tertentu, dan lainnya dalam rangka meningkatkan elektabilitas politik mereka (Vel, 2005, Li, 2007, Duncan 2009). Itu tidak jarang dilakukan bersamaan dengan mengeklusi pihak lain sebagai orang luar atau bahkan lawan dari komunitas adat mereka.

Kasus lain untuk menguji sejauhmana arifnya kearifan lokal ditunjukkan oleh Aditjondro (2007) yang memulai artikelnya dengan sub judul “Benar Indahnya Pranata Adat?”. Di situ dia mengkritik cara berbagai pihak melihat dan mengagung-agungkan pranata *pela gandong* sebagai kearifan lokal dalam penyelesaian konflik. Dengan merujuk pada temuan dua antropolog, Tanja Hohe dan Albert Ramijnsen, yang berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa *pela gandong* justru potensial memperparah dan memperluas konflik sosial. Kedua antropolog ini menganalisis mitos-mitos dan ritual dalam tradisi *pela gandong*, “mereka berpendapat bahwa *pela* – terutama *pela keras* atau *pela minum darah* – justru punya potensi memperparah konflik”. Alasannya, “persatuan antara dua pihak yang terikat persekutuan *pela* didasarkan pada oposisi

terhadap pihak ketiga. Hanya dengan membangun perlawanan bersama terhadap orang luar, maka orang-orang Ambon pribumi dapat menegakkan nilai solidaritas di antara mereka sendiri. Di situ terciptalah suatu landasan bagi suatu konflik etnik, khususnya konflik yang lebih lebar antara orang-orang Ambon-Lease dan suku-suku lain yang menghuni kepulauan itu”.

Aditjondro (2007) juga menyamakan pranata adat *pela gandong* di Maluku tersebut dengan pranata adat *motambu tana* pada suku Pamona dan suku Lore yang sering diromantisasi sebagai pranata penyelesaian konflik. Bagi dia, baik *pela gandong* maupun *motambu tana* adalah pranata lokal yang jika diteliti lebih akan ditemukan bahwa pranata-pranata adat ini justru akan memunculkan konflik yang lebih parah. Hal ini karena kedua pranata ini berbasis pada kerjasama persahabatan dalam bentuk aliansi kekuatan untuk melawan pihak ketiga.

Kasus-kasus klaim kearifan lokal yang sesungguhnya adalah ketidak-arifan lokal seperti di atas tentu dapat menjadi rujukan kita untuk menyikapi klaim kearifan lokal secara lebih berhati-hati dan kritis agar item kearifan lokal yang kita munculkan dan revitalisasikan adalah benar-benar arif secara lokal dan secara nasional. Idealisasi berlebihan terhadap kearifan lokal harus di hindari. Contoh Idealisasi terhadap kearifan lokal itu sangat tampak pada komentar John Haba yang

menyebutkan beberapa fungsi penting kearifan lokal dalam mencegah konflik sosial. Haba menyebutkan ada enam manfaati kearifan lokal. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan.

Selanjutnya, *ketiga*, kearifan lokal bersifat tidak memaksa atau *top down* karena daya ikatnya lebih mengena dan bertahan, *Keempat*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, *local wisdom* akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi (2007: 335).

#### **KOMENTAR PENUTUP**

Mungkin telah lebih dari dua dekade di tanah air ini wacana akademik kita, rekomendasi kebijakan kita, komentar pemerhati pembangunan dan aktivis pemberdayaan masyarakat, dan lainnya seolah terhipnotis dengan wacana kearifan lokal. Harus diakui kecenderungan ini membawa

banyak manfaat bagi pembangunan masyarakat. Tapi juga, di sisi lain, “euphoria” kearifan lokal harus disikapi secara kritis agar budaya lokal yang diklaim sebagai “kearifan” lokal tidak menjadi sumber destruksi sosiobudaya lebih luas. Agar hak-hak kewargaan dan kebinekaan setiap kelompok bisa terjaga dengan baik, kearifan lokal harus pula sejalan dengan kearifan nasional. Artinya apa yang diklaim sebagai kearifan lokal tidak boleh hanya bersifat arif kepada masyarakat lokal pemilik kebudayaan tersebut melainkan juga arif bagi warga Indonesia lain, terutama para pendatang yang tinggal bersama atau berdampingan dengan komunitas lokal.

Bagian pertama saya telah menguraikan beberapa bentuk kearifan lokal di beberapa kelompok etnis Maluku Utara, khususnya kearifan dalam konteks kerjasama dan tolong-menolong. Di bagian kedua saya menawarkan sikap kehati-hatian (sikap kritis) untuk tidak memperlakukan wacana kearifan lokal dan kebudayaan yang diklaim sebagai bagian dari kearifan lokal sebagai sesuatu yang *taken for granted* (tidak perlu dipertanyakan lagi). Sikap terhadap kebudayaan, konstruksi atau rekonstruksi kebudayaan yang dipandang item kearifan lokal, tidak boleh terjebak pada perspektif essentialisme bu-

daya yang cenderung meromatisasi dan memperagakan glorifikasi berlebihan terhadap adat dan kearifan lokal.

Karena kebudayaan bukanlah suatu entitas netral, dibutuhkan kejelian untuk tidak saja memetakan berbagai kearifan lokal yang ada tapi juga relasi kuasa yang bertali-temali dibalik penampakan, koleksi, pemetaan, rekonstruksi, dan reaktualisasi budaya lokal yang ada. Dengan sikap demikian, kita berharap bisa memilih dan mengembangkan item-item kebudayaan lokal yang benar-benar arif bukan saja di masa lalu tapi juga masa sekarang dan akan datang, bukan saja arif bagi masyarakat pendukung kebudayaan itu tapi juga arif bagi warga negatra lainnya, bukan saja arif bagi lokalitas kita tapi juga arif bagi nasionalitas kita.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Safruddin, Safrudin Amin, dan Adlan Absyir, 2008, *Identifikasi Nilai-nilai Tradisional Suku Bangsa di Maluku Utara*. (Laporan Penelitian).
- Adhuri, Dedi Supriadi (2005), "Perang-perang atas Laut", *Antropologi Indonesia*, Vol 29, N0.3.
- Aditjondro, George Junus, 2007. "Motambu Tana, Pranata Resolusi Konflik atau Landasan Pelebaran Konflik?", dalam *Revitalisasi Kearifan lokal*, Alpha Amirrachman (ed). ICIP – European Commission; Jakarta.
- Amin, Safrudin, Arlina Madjid, dan Andi Sumar Karman, 2009, *Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Utara dan Strategi Implementasinya*. Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional, DIKTI.
- Davidson, J. S. 2010. "Budaya dan Hak dalam Kekerasan Etnis" dalam *Adat dalam Politik di Indonesia*, J. S. Davidson, D. Henley, dan S. Moniaga (eds.). KITLV-Yayasan Obor: Jakarta.
- Duncan, Christopher R. 2009. "Reconciliation and Revitalization: The Resurgence of Tradition in Postconflict Tobelo, North Maluku, Eastern Indonesia." *Journal of Asian Studies* 68, 4: 1077- 1104.
- Haba, John, 2007, "Penutup: Analisis SWOT Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik" dalam *Revitalisasi Kearifan lokal*, Alpha Amirrachman (ed). ICIP – European Commission; Jakarta.
- Henley, David and Jamie S. Davidson, 2008, "In the Name of Adat: Regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy Indonesia", *Modern Asian Studies*, Vol. 42, No. 4, hal. 815-852.
- Kasim, Ma'ruf, Max M Richter, dan Safrudin Amin, 2010. "Social Capital and Marine Resources among Coastal Communities in Eastern Indonesia", *Policy Brief*. Australia Indonesia Governance Research Partnership Crawford School of Economics and Government, ANU College of Asia and the Pacific, The Australian National University: Canberra.
- Li, Tania. 2007. "Adat in Central Sulawesi: Contemporary Deployments." dalam *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*, Jamie S. Davidson and David Henley (ed.). Hal. 337-370. New York: Routledge.



- Saumur, Amanan Soleman, 2013, *Modal Sosial dalam Prilaku Komunitas Tidore*. Az-Zahra: Jakarta.
- Vel, Jacqueline. 2005. "Pilkada in East Sumba: An Old Rivalry in a New Democratic Setting." *Indonesia*, 80: 81-107.
- Wilson, Chris, 2013, "Ethnic outbidding' for patronage: the 2010 riots in Tarakan, Indonesia", *South East Asia Research*, Vol. 21, No. 1, hal. 105-129.